



PEMERINTAH KOTA DUMAI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JL. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai – Bagan Besar
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 700/ 22./Bappedalitbang/2022

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian resiko;
 - b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai telah melakukan penilaian risiko kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2022.
- KESATU** : Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi perhatian oleh seluruh ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal April 2022

a.n. WALIKOTA DUMAI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai,


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Walikota Dumai di Dumai.
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Dumai di Dumai

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Sasaran strategis OPD : Terwujudnya Konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | Dampak **) | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan 1.1 : Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Kurangnya data dan informasi yang tersedia dalam penyusunan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan; 2. Terlambatnya penyusunan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan daerah; | ROO.01.IF.R1 | Kepala Bidang P2EPD | - sulitnya memperoleh data dari OPD terkait | Eksternal | Terlambatnya pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; | Pemerintah Kota Dumai |
| | | | | | ROO.01.IF.R2 | Kepala Bidang P2EPD | - keterlambatan penyampaian data oleh OPD | Eksternal | Terlambatnya pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; | Pemerintah Kota Dumai |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab *) | | Dampak **) | |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | 3. Lemahnya analisa kondisi umum daerah. | ROO.01.IF.R3 | Kepala Bidang P2EPD | <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian data yang kurang lengkap dari OPD terkait - Masih kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan analisis data yang tersedia | Eksternal Internal | Kurang Optimalnya perumusan tema, prioritas pembangunan, strategi dan kebijakan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah | Pemerintah Kota Dumai |
| 2 | Sub Kegiatan 1.2 : Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keterwakilan stake holder pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 2. Tidak adanya masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKP/ RPJMD. | ROO.02.IF.R1 | Kepala Bidang P2EPD | <ul style="list-style-type: none"> - rendahnya tingkat kehadiran stake holder pembangunan | eksternal | Rancangan Awal RKP/ RPJMD hanya dari sisi tekhokratik dan politis | Stake holder pembangunan |
| 3 | Sub Kegiatan 1.3 : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah forum OPD yang dilaksanakan | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD; | ROO.03.IF.R1 | Kepala Bidang P2EPD | <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya perhatian dari pejabat yang berwenang di masing-masing OPD terhadap proses perencanaan pembangunan | Eksternal | Kurangnya kualitas Rancangan RKP/ RPJMD dan Renja Perangkat Daerah | Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| II | Program : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan 3 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | |
| 7 | Sub Kegiatan 3.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (Bid. PPM) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan PPM) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.07.IF.R1 | Kepala Bidang PPM | - Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah | internal dan eksternal | terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah | Pemko Dumai |
| 8 | Sub Kegiatan 3.2 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan. | ROO.08.IF.R1 | Kepala Bidang PPM | - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya | internal dan eksternal | menghambat pelaksanaan survey | Bappedalitbang |
| | | | | | ROO.08.IF.R2 | Kepala Bidang PPM | - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan | internal dan eksternal | hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan | Bappedalitbang |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 9 | Sub Kegiatan 3.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Data (bid. Pembangunan Manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia | ROO.09.IF.R1 | Kepala Bidang PPM | - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merenkanya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pembangunan manusia | internal dan eksternal | menghambat pelaksanaan survey | Bappedalitbang |
| 10 | Sub Kegiatan 3.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia di Kota Dumai dengan dokumen perencanaan propinsi dan nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan bid. pembangunan manusia propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai | ROO.10.IF.R1 ROO.10.IF.R2 | Kepala Bidang PPM Kepala Bidang PPM | - Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat | internal dan eksternal internal dan eksternal | tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai | Pemko Dumai Pemko Dumai |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | | Dampak **) | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| Kegiatan 4 : Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sub Kegiatan 4.1 : Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (Bid. Perekonomian dan SDA) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan PPM) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.11.IF.R1 | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | - Dalam penyusunan Renja OPD belum memedomani peraturan yang berlaku - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah | internal dan eksternal | internal dan eksternal | terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah | Pemko Dumai Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan |
| 12 | Sub Kegiatan 4.2 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Data (bid. Perekonomian dan SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | ROO.12.IF.R1 ROO.12.IF.R2 | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang perekonomian | internal dan eksternal internal dan eksternal | internal dan eksternal | menghambat pelaksanaan survey hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan | Bappedalitbang Bappedalitbang |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 13 | Sub Kegiatan 4.3 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA di Kota Dumai dengan dokumen perencanaan propinsi dan nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan bid. Perekonomian propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai | ROO.13.IF.R1 | Kepala Bidang Perencanaan dan SDA | - Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat | internal dan eksternal | tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional | Pemko Dumai |
| Kegiatan 5 : Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| 14 | Sub Kegiatan 5.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (Bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.14.IF.R1 ROO.14.IF.R2 | Kepala Bidang Inpraswil Kepala Bidang Inpraswil | - Dalam penyusunan Renja OPD belum memedomani peraturan yang berlaku - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah | internal dan eksternal internal dan eksternal | terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah | Pemko Dumai Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab *) | | Dampak **) | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 15 | Sub Kegiatan 5.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Persiapan/ Perencanaan/ Pengarangan/ Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.15.IF.R1 | Kepala Bidang Infrastwil | - Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD | internal dan eksternal | Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai | Bappedalitbang dan Pemko Dumai |
| 16 | Sub Kegiatan 5.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persiapan/ Perencanaan/ Pengarangan/ Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur | ROO.16.IF.R1 | Kepala Bidang Infrastwil | - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya | internal dan eksternal | tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah | Bappedalitbang |
| | | | | | ROO.16.IF.R2 | Kepala Bidang Infrastwil | - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang infrastruktur | internal dan eksternal | hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan | Bappedalitbang |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| 17 | Sub Kegiatan 5.4 : Kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan bidang infrastruktur di Kota Dumai dengan dokumen perencanaan propinsi dan nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan bidang infrastruktur propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai | ROO.17.IF.R1 | Kepala Bidang Infracwil | - Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat | internal dan eksternal | tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional | Pemko Dumai | |
| 18 | Sub Kegiatan 5.5 : Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (Bid. Kewilayahan dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.18.IF.R1 ROO.18.IF.R2 | Kepala Bidang Infracwil Kepala Bidang Infracwil | - Dalam penyusunan Renja OPD belum memedomani peraturan yang berlaku - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah | internal dan eksternal internal dan eksternal | terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah | Pemko Dumai Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| 19 | Sub Kegiatan 5.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (urusan Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD | ROO.19.IF.R1 | Kepala Bidang Infrastwil | - Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD | internal dan eksternal | Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai | Bappedalitbang dan Pemko Dumai | |
| 20 | Sub Kegiatan 5.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | 1. Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan bidang Kewilayahan | ROO.20.IF.R1 ROO.20.IF.R2 | Kepala Bidang Infrastwil Kepala Bidang Infrastwil | - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang kewilayahan | internal dan eksternal internal dan eksternal | menghambat pelaksanaan survey hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan | Bappedalitbang Bappedalitbang | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| 21 | Sub Kegiatan 5.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | 1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan bidang kewilayahan di Kota Dumai dengan dokumen perencanaan propinsi dan nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan bidang kewilayahan propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai | ROO.21.IF.R1 | Kepala Bidang Infrastwil | - Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional | internal dan eksternal | tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional | Pemko Dumai | |
| III | Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan 6 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | |
| 22 | Sub Kegiatan 6.1 : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (E-Litbang) | Persiapan/Perencanaan/Penganggaran/Pelaksanaan | 1. Banyaknya data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran tidak tersedia; | ROO.22.IF.R1 | Kepala Bidang Litbang | Data-data/dokumen yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah penghasil Data tidak disampaikan dan tidak dipublish ke website perangkat Daerah tersebut; | eksternal | Rendahnya hasil pengukuran indeks | Pemko Dumai | |

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab *) | | | Dampak **) | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | 2. Kurangnya perhatian dari masing-masing OPD terhadap masalah kelitimbangan di OPDnya. | ROO.22.IF.R2 | Kepala Bidang Litbang | Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang masalah kelitimbangan di OPD | internal dan eksternal | sulitnya mengumpulkan data untuk masalah kelitimbangan | Bappedalitbang |
| Kegiatan 7 : | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | |
| 23 | Sub Kegiatan 7.1 : | | | 1. Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPDnya 2. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kurang Inovatif | ROO.23.IF.R1 | Kepala Bidang Litbang | tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan inovasi di OPD | eksternal | Rendahnya hasil pengukuran indeks inovasi daerah | Pemko Dumai |
| | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah dokumen Inovasi Teknologi | Persiapan/ Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan | | ROO.23.IF.R2 | Kepala Bidang Litbang | kurangnya perhatian tiap-tiap OPD dalam pengembangan inovasi di OPDnya | internal dan eksternal | Pemerintah Kota Dumai termasuk dalam katagori Daerah Kurang Inovatif | Bappedalitbang dan Pemko Dumai |

Dumai, April 2022

Dibuat oleh Pemilik Risiko :

1. MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng
NIP. 19801025 200501 1 009

2. ARIKE TRESMITA, S.Pi. M.Si
NIP. 19770405 200112 2 003

3. HAMOD ISSFAD, S.Pi, M.Si
NIP. 19740122 200003 1 005

4. INSANI TAQWA SAILI, ST
NIP. 19870929 201001 1 006

5. JAYA HANDAYANA, SE, MM
NIP. 19770308 200904 1 001

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

